

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan Inflasi Kabupaten Enrekang dilihat berdasarkan sister-city yaitu Kabupaten Sidenreng Rappang. pada bulan Maret tahun 2025 sebesar 0,69 persen, dan inflasi month-to-month sebesar 2,07 persen. Indeks Harga Konsumennya sebesar 103,81. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y antara lain, emas perhiasan, cabai rawit, kopi bubuk, bawang merah, dan minyak goreng. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil. sumbangan inflasi m-to-m antara lain, tarif Listrik, cabai rawit, cumi-cumi, emas perhiasan, dan udang basah. Pada Maret 2025, kelompok pengeluaran yang memberikan andil. sumbangan inflasi y-on-y yaitu, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,41 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,21 persen, dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,01 persen.

Perkembangan Harga Kabupaten Enrekang juga dapat dilihat dari IPH (Indeks Perubahan Harga). Rata-rata IPH Kabupaten Enrekang pada bulan Maret sebesar 3,56 dengan komoditas yang memiliki fluktuasi harga tertinggi antara lain, cabai merah, cabai rawit, dan pisang. Meningkatnya harga beberapa komoditas pokok meningkatkan resiko kedepannya. Diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk sering turun kelapangan untuk memantau harga bahan pokok sehingga dapat diketahui komoditas yang menyebabkan terjadinya Inflasi, dan melakukan pemantauan harga bahan kebutuhan pokok untuk mengantisipasi naiknya harga di Pasar Tradisional bisa ditekan/diminimalisir dan untuk menekan kenaikan harga juga Pemerintah mengadakan Pasar Murah dan bekerjasama dengan Bulog Sidrap sehingga dapat membantu masyarakat di dalam Pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan Pengendalian Inflasi di Daerah terutama di Kabupaten Enrekang terdiri dari, Pengendalian Inflasi rendahnya Konektivitas jaringan Distribusi Pangan yang di maksud adalah permasalahan konektivitas yang di hadapi oleh Daerah yang mana ketergantungan pasokan antar daerah yang cukup tinggi, Kesenjangan Informasi dan Distorsi Struktur Pasar menyebabkan tidak efisiennya harga di pasar sedangkan Distorsi Struktur Pasar di timbulkan adanya kekauan dalam perilaku pembentukan harga, Terjadinya gejolak harga akibat tingginya permintaan pada saat memasuki bulan Ramadhan 1446, Produktivitas Pangan di pengaruhi oleh Iklim menjadi tantangan yang dihadapi terutama Produksi Pangan sehingga Pemerintah Kabupaten Kota mengadakan pemantauan dan perbaikan di sisi distribusi dan diperkuat kerjasama dengan aparat hukum dan peningkatan jam kerja sehingga dapat meningkatkan Produktifitas masyarakat.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah terutama di Kabupaten Enrekang yaitu dengan melakukan Monitoring/Pemantauan Harga Bahan Pokok di Pasar termasuk menjelang hari besar keagamaan Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri, Melakukan Pasar Murah, Meningkatkan Hasil Produksi, mempermudah masuknya barang Impor, menstabilkan pendapatan masyarakat (tingkat Upah), menetapkan harga maksimum serta melakukan

pengawasan Distribusi barang, Melakukan rapat koordinasi TPID secara rutin dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah, pemantauan/pembinaan Pangkalan LPG 3 Kg, BPS (Badan Pusat Statistik) mengumumkan angka Inflasi secara Transparan hingga tingkat Kabupaten/Kota agar memberikan Informasi yang akurat kepada masyarakat dan mempengaruhi kebijakan Pengendalian Inflasi.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Enrekang terdiri dari Menambah Hasil Produksi dengan cara memberikan kebijakan kepada masyarakat untuk menggenjot produksi agar lebih banyak lagi dengan banyaknya barang yang beredar Pengendalian Harga maka perputaran uang akan semakin cepat dan banyak sehingga uang beredar menjadi kembali seimbang, mempermudah masuknya barang Impor salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan dalam Negeri, Menetapkan Harga Maksimum agar harga barang cenderung naik tak terkendali sehingga membuat daya beli masyarakat menurun, sehingga Pemerintah berharap agar daya beli masyarakat menjadi lebih baik lagi, Pengawasan Distribusi Barang merupakan salah satu cara mengatasi Inflasi agar tidak terjadi kenaikan harga barang yang meningkat, Pengendalian Harga Beras menjadi Prioritas Utama karena merupakan kebutuhan Pokok masyarakat yang dampaknya dirasakan langsung dan mempunyai multi efek terhadap harga barang jasa lainnya, Meningkatkan sinergitas melalui Tim Pengendalian Inflasi, Satgas Pangan, Forkofinda dan Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah terdiri dari, Melakukan Komunikasi Publik yang tidak membuat masyarakat panik dan mengupayakan masyarakat tetap tenang, Mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota agar bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Mengaktifkan Satgas Pangan di Daerah yang memiliki Tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk di laporkan kepada Daerah secara berjenjang kepada Kemendagri dan mengecek langsung ke Lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk masalah yang terjadi, BBM Subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu sehingga perlu pengawasan oleh Pemda dan bantuan pengawasan dari penegak hukum, Gerakan tanam pangan cepat Panen yakni gerakan menanam seperti Cabe merah dan bawang merah untuk mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga, Kerjasama antar Daerah meliputi seluruh Komoditas Pangan Strategis di setiap item komoditas dikaji oleh setiap Daerah, BPS dan BI beserta Provinsi selalu mengumumkan angka Inflasi sehingga tingkat Kabupaten/Kota, Jadikan Isu Pengendalian Inflasi sebagai isu Prioritas sehingga seluruh stakeholder bersinergi.